

PERANAN PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Dewi Puspitasari, S.H.

Staf Perpustakaan Universitas Airlangga

Abstrak

Di dunia Perguruan Tinggi merupakan tempat yang subur untuk melahirkan karya-karya ilmiah yang diharapkan mampu memberi sumbangan yang positif dalam kemajuan bangsa, namun karya-karya ilmiah tersebut harus mampu dilindungi dalam suatu pengaturan yang biasa disebut Hukum Hak Cipta. Hukum hak cipta terbaru UU No 19 tahun 2002 memberikan peluang yang besar kepada pihak perpustakaan khususnya Perpustakaan Perguruan Tinggi untuk melindungi dari tindakan duplikasi atau plagiat. Upaya yang bisa dilakukan oleh Perpustakaan Perguruan Tinggi memang tidak bisa menjadi "single fighter" dalam upaya penegakan hukum hak cipta ini, namun Perpustakaan Perguruan Tinggi bisa menjadi fasilitator dengan menyediakan data base yang bisa diakses oleh siapapun terutama dosen pembimbing skripsi atau pihak yang lain untuk bisa melakukan upaya preventif mencegah tindakan duplikasi.

PENDAHULUAN

Perpustakaan Perguruan Tinggi yang merupakan jantung bagi aktivitas civitas akademika. Melalui perpustakaan setiap civitas akademika bisa belajar dan mengembangkan kemampuan diri sesuai bidang yang ditekuni. Aset perpustakaan berupa buku, majalah, jurnal, hasil penelitian, skripsi, tesis dan lain-lain memberikan kontribusi yang besar terhadap proses pembelajaran.

Selain itu Perpustakaan Perguruan Tinggi juga berfungsi untuk melestarikan aset perpustakaan yang menjadi rujukan dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi. Pada sisi yang lain perguruan tinggi adalah tempat untuk menghasilkan karya ilmiah/buah pikiran manusia yang mampu memberikan solusi dari setiap persoalan kehidupan yang ada. Semua karya ilmiah itu disimpan dan didokumentasikan di Perpustakaan Perguruan Tinggi. Namun setiap orang yang ingin berkarya tidak diperbolehkan untuk menjiplak karya orang

lain serta dia mengakui karya orang lain sebagai karyanya.

Kode etik tentang larangan menjiplak karya orang lain tersebut sudah diketahui secara luas oleh masyarakat, khususnya kalangan civitas akademika suatu perguruan tinggi. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa penjiplakan tersebut tetap saja terjadi baik pelakunya dari kalangan mahasiswa ataupun dosen.

Orisinalitas dan kemurnian suatu karya ilmiah adalah hal sangat penting, karena hal ini menunjukkan kehormatan dan kualitas dari pencipta. Pemerintah sendiri juga tidak tinggal diam telah menerbitkan Undang-undang Perlindungan Hak Cipta selama 2 dekade ini. Sedangkan perpustakaan khususnya Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagai pihak yang di "amanahi" oleh Undang-undang untuk menyimpan, menemukan kembali serta menyebarkan suatu karya ilmiah dituntut bersikap arif dalam melayani tuntutan jaman yang semakin mengglobal.

Sementara itu pihak yang juga akan dituding berperan atau memberikan fasilitas kepada orang-orang yang berniat melakukan aktivitas plagiarisme tersebut salah satunya adalah Perpustakaan atau Pusat Dokumentasi Non Komersial. Maka tulisan ini dibuat untuk memberikan gambaran tentang perlindungan terhadap karya ilmiah agar tidak terjadi suatu duplikasi yang disengaja baik yang telah dilakukan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui optimalisasi peran Perpustakaan Perguruan Tinggi.

PERKEMBANGAN PENGATURAN HAK CIPTA DI INDONESIA

Pengaturan Hukum Hak Cipta di Indonesia mengalami banyak perubahan dari jaman ke jaman. Pengaturan yang pertama pada tahun 1982 Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 2 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Namun dengan berbagai macam pertimbangan, salah satunya karena UU No 2 tahun 1982 dinilai tidak sesuai dengan tuntutan hukum masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional. Hal ini dipicu oleh desakan Amerika Serikat kepada Indonesia karena Antony (warga negara Indonesia) yang menjadi tersangka pembajakan lagu-lagu milik warga AS (Bob Geldof dan Madonna).

Sederetan kasus pelanggaran hak cipta pada periode 1980–1986 begitu marak yang membuat Amerika Serikat mendesak Ronald Reagan (Presiden AS kala itu) untuk melakukan pembicaraan dua mata dengan Presiden RI Soeharto di Hotel Nusa Dua Bali. Akhirnya presiden Suharto menerbitkan keputusan, untuk membentuk tim penyempurna UU Hak Cipta 1982 kemudian pada tahun 1987 muncul UU hak cipta no 7 tahun 1987.

Sekali lagi atas desakan internasional khususnya AS, bangsa Indonesia tidak mampu menghindari diri untuk tidak merubah aturannya tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Hal tersebut berawal dari masuknya Indonesia dalam pergaulan dunia dengan menjadi anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual*

Property Rights (Persetujuan Tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut **TRIP's**. TRIP's ini merupakan hasil kesepakatan pertemuan WTO hasil putaran Uruguay di Marakesh bulan April 1994. Akhirnya Bangsa Indonesia meratifikasi TRIP's menjadi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 tahun 1994. Terakhir semua Undang-undang tersebut dicabut dan diganti dengan undang-undang baru No 19 tahun 2002 tentang hak cipta. UU No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta tersebut berlaku sampai sekarang.

PENGATURAN HAK CIPTA DALAM UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2002

Dalam Undang-undang no 19 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah Hak Eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan yang berlaku.

Sedangkan yang dimaksud hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya saja atau orang lain dengan seijin pemegang hak cipta tersebut. Sedangkan pengertian "mengumumkan" atau "memperbanyak" menurut Undang-undang No. 19 tahun 2002 adalah meliputi kegiatan menterjemah, mengadaptasi, mengimpor, mengarangsemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewa, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Hak cipta adalah hak yang secara otomatis melekat kepada siapapun yang menghasilkan ciptaan baik ciptaan tersebut didaftarkan secara resmi kepada Direktorat Jendral atau tidak didaftarkan. Maka menurut UU no 19 tahun 2002 ciptaan yang tidak didaftarkan juga wajib dilindungi oleh hukum. Sedangkan yang termasuk ciptaan yang dilindungi meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup:

- a. buku, program computer, pamphlet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain

- b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
 - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks
 - e. drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantomin
 - f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolose dan seni terapan.
 - g. arsitektur
 - h. peta
 - i. seni batik
 - j. fotografi
 - k. sinematografi
 - l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
- c. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - (i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - (ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta
 - d. Perbanyakkan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf Braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakkan itu bersifat komersil
 - e. Perbanyakkan suatu ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersil semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.
 - f. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan
 - g. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk keperluan sendiri.

Apabila terdapat upaya mengumumkan atau memperbanyak bahkan melakukan duplikasi demi keuntungan diri sendiri maka pihak yang bersangkutan bisa dianggap melanggar hak cipta.

Namun ada pula ciptaan yang boleh digunakan siapa saja dan pemakaiannya tidak dianggap melanggar hak cipta yaitu:

- a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara
- b. peraturan perundang-undangan
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- e. keputusan badan *arbitrase* atau keputusan badan-badan sejenis lainnya

Pembatasan hak cipta juga diatur dalam UU no. 19 tahun 2002, pembatasan tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang tindakan yang dianggap bukan pelanggaran Hak Cipta. Tindakan tersebut adalah pengambilan sumber dari ciptaan orang lain dengan menyebutkan sumbernya yang meliputi:

- a. penggunaan ciptaan orang lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
- b. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan

Pembatasan menggunakan ciptaan orang lain tersebut dalam Undang-undang yang baru diharapkan bisa lebih sesuai dengan perkembangan jaman, karena ukuran pelanggaran tidak lagi terletak kepada berapa lembar atau berapa kopi yang telah diambil dari karya orang lain. UU No 19 tahun 2002 memungkinkan bagi siapa saja untuk mengutip karya orang lain seperti uraian di atas dengan syarat harus disebutkan sumbernya.

Maka hal ini berbeda dengan Undang-undang Hak Cipta No 2 tahun 1982 pasal 14 jo Undang-undang No 7 tahun 1987 yang memperbolehkan setiap orang untuk mengutip atau mengkopi 10% dari seluruh isi ciptaan dan hal ini tidak dikatakan sebagai pelanggaran. Dalam Undang-undang tahun 1982 dan Undang-undang tahun 1987 masih dimungkinkan suatu buku atau hasil ciptaan dikopi tiap hari 10% dan akhirnya suatu saat bisa dikopi 100%.

Kemudian diadakan perbaharuan dengan lebih menitikberatkan tidak kepada ukuran fisik/ ukuran kuantitatif dalam hal penetapan standar pelanggaran hak cipta. Namun dalam Undang-

undang hak cipta terbaru lebih menitikberatkan kepada ukuran substansi atau ukuran kualitatif.

PERANAN PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENCEGAH PELANGGARAN HAK CIPTA

Dalam dunia perguruan tinggi setiap mahasiswa yang akan lulus diwajibkan untuk membuat karya ilmiah berbentuk skripsi, laporan tugas akhir, tesis, disertasi atau karya ilmiah yang lain. Demikian pula setiap dosen diwajibkan untuk membuat penelitian atau karya ilmiah untuk kemajuan kariernya. Pembuatan karya ilmiah tersebut dinilai tidak mudah, akhirnya jalan pintas yang ditempuh adalah dengan menjiplak karya orang lain dengan tidak menyebutkan sumbernya secara lengkap. Apabila jiplak menjiplak ini terjadi maka pihak yang dituding memberi andil yang besar adalah perpustakaan perguruan tinggi sebagai tempat dimana karya tulis itu disimpan.

Hal ini menjadi pisau bermata dua bagi perpustakaan, karena Undang-undang memperbolehkan instansi yang bisa melakukan perbanyakan suatu ciptaan secara terbatas adalah:

- a. Perpustakaan umum
- b. Lembaga ilmu pengetahuan dan pendidikan; dan
- c. Pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya

Perpustakaan Perguruan Tinggi dalam aktivitasnya sudah berusaha seoptimal mungkin menjaga agar tidak terjadi duplikasi karya ilmiah atau plagiarisme. Upaya yang telah ditempuh selama ini adalah:

- a. karya tulis seperti skripsi, tesis, disertasi dan penelitian diletakkan dalam ruang tersendiri dan tidak dipinjamkan untuk dibawa pulang
- b. karya tulis tersebut hanya bisa dibaca di tempat dan tidak bisa dibaca di luar tempat
- c. karya tulis tersebut bisa dikopi dengan pembatasan halaman dan petugas perpustakaan akan mengkopikan untuk pengguna

Upaya yang telah dilakukan oleh perpustakaan tersebut diharapkan dapat menjaga dari upaya duplikasi, namun tidak bisa dipungkiri penjiplakan karya tulis tersebut masih bisa terjadi baik

dilakukan oleh mahasiswa atau dosen dari perguruan tinggi yang bersangkutan atau mahasiswa dan dosen dari perguruan tinggi yang lain. Bahkan plagiarisme tersebut sampai terjadi di tingkat mahasiswa pascasarja dalam hal pembuatan tesis atau disertasi. Hal ini terjadi karena ada Faktor-faktor tertentu yang masih menyebabkan plagiarisme karya tulis terjadi, faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Civitas akademika kurang memahami aplikasi dari Undang-undang hak cipta khususnya yang terbaru
Kebolehan mengutip karya tulis orang lain dengan syarat yang telah ditetapkan Undang-undang hak cipta tidak dibarengi dengan pengetahuan mahasiswa terkait pembuatan kutipan.
- b. Plagiat atau orang yang menjiplak karya orang lain memiliki moral yang kurang baik
Di jaman serba kapitalistik ini mendorong orang untuk cepat meraih kenikmatan duniawi tanpa memperhitungkan faktor moral, sehingga dengan alasan apapun seseorang melakukan plagiarisme
- c. Tidak adanya upaya preventif
Tindakan plagiarisme saat ini baru diketahui ketika suatu karya dijiplak itu sudah jadi. Belum ada suatu upaya preventif atas plagiarisme, sehingga kita masih menangani plagiarisme dari sisi kuratif. Hal itu terjadi pada tingkatan mahasiswa yang sedang menulis skripsi atau tugas akhir, dosen pembimbing yang bersangkutan tidak mengetahui jika mahasiswanya menjiplak dari karya orang lain. Ini disebabkan tidak ada suatu data base dari Perpustakaan Perguruan Tinggi yang bisa diakses untuk mengetahui karya ilmiah yang telah dihasilkan khusus untuk menghindari plagiarisme

Upaya yang bisa dilakukan untuk menekan plagiarisme di dunia perguruan tinggi adalah:

- a. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang perlindungan hak cipta terutama dalam pembuatan karya ilmiah baik itu makalah, laporan penelitian, skripsi, tugas akhir, tesis dan disertasi serta karya ilmiah yang sejenisnya.

- b. Menerbitkan aturan praktis pembuatan kutipan pada karya ilmiah di tingkat universitas.
- c. Pendidikan moral kepada mahasiswa dan dosen Pendidikan moral ini bisa berbentuk *training* sehari, pelatihan, *outbond* dan bentuk-bentuk yang lain serta dirancang tidak menjemukan serta tidak hanya ditujukan untuk mahasiswa baru saja tetapi merupakan kegiatan rutin yang intinya untuk mengasah moralitas masyarakat kampus.
- d. Pembuatan jaringan/*networking* antar perguruan tinggi dalam pembuatan data base karya ilmiah

Jaringan antar perguruan tinggi ini sebenarnya sudah mulai diwujudkan dengan adanya FKP2T (Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi) yang merupakan jaringan Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan sebagian Jawa Barat. Namun paradigma yang berkembang masih seputar tukar menukar informasi saja. Jaringan/*networking* ini belum dilandasi adanya kesadaran untuk menekan angka plagiarisme. Hal ini bisa diwujudkan oleh dua atau tiga Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagai "*pioneer*" dengan membuat pangkalan data yang selanjutnya bisa diakses melalui web masing-masing Perpustakaan. Kemudian Perpustakaan bisa memasarkan "produk terbarunya" ini ke fakultas-fakultas supaya bisa digunakan oleh para dosen pembimbing untuk memastikan bahwa mahasiswa yang dibimbingnya tidak melakukan plagiarisme.

KESIMPULAN

Undang-undang terbaru tentang hak cipta yaitu Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 memberikan definisi tentang pelanggaran hak cipta

tidak pada ukuran kuantitatif tetapi pada ukuran kualitatif. Hal ini dikarenakan jika memakai ukuran kualitatif maka pelanggaran hak cipta masih bisa terjadi meskipun telah ada aturan yang berlaku.

Untuk bisa mengatasi plagiarisme ini memang diperlukan komitmen yang tinggi dari pihak terkait, baik itu mahasiswa, dosen dan pihak birokrat kampus. Karena manfaat yang diperoleh bukan sesuatu yang sifatnya materiil yang langsung bisa dirasakan. Namun Perpustakaan Perguruan Tinggi bisa menjadi fasilitator sekaligus bisa "*menstimulan*" pihak-pihak tersebut untuk ikut serta menegakkan budaya kejujuran di dunia perguruan tinggi. Peran Perpustakaan Perguruan Tinggi ini sangat strategis dalam menggagas dan mensosialisasikan untuk adanya pangkalan data yang bisa diakses siapapun terutama dosen pembimbing skripsi untuk mengantisipasi plagiarisme. Pangkalan data tersebut juga bisa diakses oleh siapapun yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barizah, Nurul. 2003. *Penegakan dan Perlindungan Hukum Hak Cipta di Lingkungan Universitas Airlangga*, Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.
- Ramli, Ahmad M. 2000. *HAJI: Hak Atas Kepemilikan Intelektual, Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*. Bandung: Mandar Maju.
- Saidin, OK. 2003. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI tahun 2002, Jakarta: Eko Jaya, 2003.

A User is not dependent on us.....we are dependent on him

[Pengguna tidak tergantung pada kita.....kita tergantung padanya]

A User is not interruption of our work.....he is the purpose of it.

We are not doing a favour by serving him.....

he is doing a favour by giving us the opportunity to do so

[Pengguna bukanlah penyela pekerjaan kita.....

ia tujuan dari pekerjaan kita. Kita tidak berbuat menyenangkan dengan melayaninya.....

ia berbuat menyenangkan kita dengan memberi kita peluang untuk berbuat sesuatu]

by L.L.Bean